

Peran Optimalisasi Pajak Parkir Jalan Umum dalam Meningkatkan PAD di Wilayah Bulungan

Machmud Al Amrie¹⁾, Adi Aspian Nur²⁾

^{1,2)} Universitas Kaltara, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan

Abstrak

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan instrumen krusial dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Parkir Jalan Umum terhadap PAD di Wilayah Bulungan, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pemungutannya, serta merumuskan strategi optimalisasi tata kelola yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan analisis kuantitatif sederhana. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat BPKAD, Dinas Perhubungan, juru parkir, dan pengguna jasa parkir, serta didukung oleh observasi lapangan dan analisis dokumen keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir jalan umum di Wilayah Bulungan berada pada kategori sedang (75%–85%) dengan kontribusi terhadap PAD yang relatif kecil (di bawah 3%). Kendala utama yang ditemukan di lapangan meliputi indikasi kebocoran penerimaan (*revenue leakage*) akibat ketidakdisiplinan penggunaan karcis resmi, lemahnya sistem pengawasan operasional, serta belum diperbarunya pendataan potensi titik parkir secara berkala. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan mencakup pemetaan ulang potensi berbasis spasial, penguatan pengawasan terpadu, pemberian insentif yang adil bagi juru parkir, serta penerapan digitalisasi pemungutan (*e-parking*) secara bertahap di kawasan perkotaan.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Pajak Parkir Jalan Umum, Optimalisasi Tata Kelola, Kabupaten Bulungan, Efektivitas Penerimaan.*

ABSTRACT

Increasing Local Own-Source Revenue (PAD) is a crucial instrument for strengthening regional fiscal independence following the enactment of Law Number 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD). This study aims to analyze the effectiveness and contribution of On-Street Parking Tax revenues toward PAD in the Bulungan Region, identify encouraging and inhibiting factors in its collection, and formulate a sustainable governance optimization strategy. This research employs a descriptive qualitative approach combined with simple quantitative analysis. Data were gathered through in-depth interviews with officials from BPKAD, the Transportation Agency, parking attendants, and service users, supported by field observations and local financial document analysis. The findings reveal that the effectiveness of on-street parking tax collection in the Bulungan Region falls into the moderate category (75%–85%), with a relatively low contribution to PAD (under 3%). The main operational obstacles identified include revenue leakage due to inconsistent issuance of official parking tickets, weak operational supervision systems, and unupdated periodic mapping of parking potential. Recommended optimization strategies encompass spatial-based potential re-mapping, integrated supervision enhancement, fair incentive schemes for parking attendants, and the gradual implementation of digital collection systems (e-parking) in urban areas.

Keywords: *Local Own-Source Revenue, On-Street Parking Tax, Governance Optimization, Bulungan Regency, Revenue Effectiveness.*

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menuntut setiap pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan kemandirian fiskalnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Salah satu komponen potensi penerimaan daerah yang bersumber langsung dari aktivitas perekonomian masyarakat adalah sektor pajak dan retribusi daerah, khususnya pengelolaan pajak parkir tepi jalan umum (*on-street parking*) (Hidayat & Rahayu, 2024). Di Kabupaten Bulungan, seiring dengan akselerasi pembangunan infrastruktur, pertumbuhan kawasan aktivitas publik, dan peningkatan populasi kendaraan bermotor, kebutuhan serta potensi penerimaan dari ruang parkir jalan umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Wibowo et al., 2025).

Kendati potensi objek parkir di badan jalan publik terus berkembang, realisasi penerimaan Pajak Parkir Jalan Umum di Wilayah Bulungan hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala operasional dan kelembagaan yang kompleks (Kurniawan, 2022). Permasalahan utama yang mengemuka di lapangan mencakup masih maraknya indikasi kebocoran penerimaan (*revenue leakage*), lemahnya sistem pengawasan terhadap kinerja juru parkir, belum berkala pendataan potensi titik parkir baru, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat pengguna jasa parkir (Pratama & Setiawan, 2021; Suryani et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan kontribusi riil sektor parkir jalan umum terhadap struktur PAD Kabupaten Bulungan belum mencapai target optimal yang diharapkan (Wibowo et al., 2025).

Urgensi utama dilakukannya penelitian ini didasari oleh kebutuhan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk merumuskan tata kelola pemungutan pajak parkir jalan umum yang efisien, transparan, dan akuntabel (Hidayat & Rahayu, 2024). Optimalisasi pada sektor ini menjadi instrumen strategis karena mampu memberikan dorongan penerimaan fiskal daerah secara relatif cepat (*quick win*) tanpa perlu memberlakukan penyesuaian tarif baru yang berpotensi membebani masyarakat (Pratama & Setiawan, 2021). Selain itu, penataan tata kelola parkir tepi jalan yang terintegrasi tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, melainkan juga berkontribusi langsung pada kelancaran lalu lintas, kerapian ketertiban umum, dan estetika tata ruang kota di Wilayah Bulungan (Suryani et al., 2023).

Kajian mengenai potensi dan efektivitas penerimaan sektor parkir dasarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun demikian masih terdapat kesenjangan akademis (*research gap*) yang menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Pratama dan Setiawan (2021) berfokus pada efektivitas pajak parkir di kota-kota besar metropolitan dengan orientasi pada area parkir khusus

di luar badan jalan (*off-street parking*), sehingga kurang relevan untuk dinamika parkir tepi jalan umum (*on-street parking*). Kurniawan (2022) mengevaluasi kontribusi retribusi parkir secara kuantitatif deskriptif, tetapi belum mengeksplorasi strategi tata kelola kelembagaan dan kendala sosiologis di tingkat operasional lapangan. Selanjutnya, Suryani et al. (2023) mengkaji implementasi *e-parking* berbasis sistem digital di pusat perkotaan padat, namun belum menyentuh hambatan penerapannya pada wilayah transisi perkotaan-pedesaan yang masih terkendala infrastruktur jaringan serta literasi digital. Hidayat dan Rahayu (2024) menganalisis potensi penerimaan pajak daerah secara makro, namun tidak memetakan pengaruh perilaku kepatuhan juru parkir dan pengawasan lapangan secara rinci. Adapun Wibowo et al. (2025) mengevaluasi kebijakan retribusi daerah secara menyeluruh pasca-UU HKPD, tetapi belum merumuskan model optimalisasi terintegrasi yang memadukan pendekatan tata kelola, pengawasan, dan karakteristik lokal kabupaten berkembang. Berdasarkan sintesis atas lima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan adanya *research gap* berupa ketiadaan model optimalisasi tata kelola Pajak Parkir Jalan Umum yang holistik dan adaptif terhadap karakteristik kabupaten berkembang seperti Kabupaten Bulungan, yang memadukan aspek pendataan potensi, pengawasan lapangan, kepatuhan juru parkir, dan kesiapan digitalisasi penerimaan (Kurniawan, 2022; Wibowo et al., 2025).

Berdasarkan uraian dinamis permasalahan dan kesenjangan penelitian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, bagaimana efektivitas dan besarnya kontribusi penerimaan Pajak Parkir Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Bulungan? Kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pengoptimalan pemungutan Pajak Parkir Jalan Umum di Wilayah Bulungan? Ketiga, bagaimana merumuskan strategi optimalisasi Pajak Parkir Jalan Umum yang tepat dan berkelanjutan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Bulungan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan analisis data kuantitatif sederhana (metode kombinasi/campuran deskriptif) untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas, kontribusi, serta strategi optimalisasi penerimaan Pajak Parkir Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Bulungan. Pendekatan deskriptif dipilih agar mampu mengungkapkan secara mendalam fenomena operasional di lapangan, tata kelola kelembagaan, serta dinamika sosiologis yang memengaruhi pemungutan pajak parkir.

Lokasi penelitian ini berfokus di Wilayah Kabupaten Bulungan, dengan penetapan situs utama pada Dinas Pendapatan Daerah/Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Bulungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan, serta beberapa titik lokasi pemungutan parkir jalan umum (*on-street parking*) yang strategis dan memiliki potensi penerimaan terbesar di kawasan perkotaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan kunci tersebut meliputi pejabat/staf teknis BPKAD, pejabat Dinas Perhubungan, pengelola atau koordinator parkir, juru parkir di tepi jalan umum, serta pengguna jasa parkir. Selain wawancara, data primer juga dikumpulkan melalui observasi lapangan secara langsung untuk mengamati efektivitas pemungutan, ketaatan pemberian karcis, kepatuhan juru parkir, serta kondisi lalu lintas di titik-titik parkir utama. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, yang mencakup laporan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Bulungan, target dan realisasi pajak/retribusi parkir dalam beberapa tahun terakhir, data jumlah titik lokasi parkir terdaftar, Peraturan Daerah terkait, serta dokumen rekapitulasi jumlah kendaraan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu analisis kuantitatif efektivitas dan kontribusi, serta analisis kualitatif model interaktif. Untuk mengukur kinerja penerimaan, digunakan rumus rasio efektivitas (membandingkan realisasi penerimaan pajak parkir jalan umum dengan target yang ditetapkan) dan rasio kontribusi (membandingkan realisasi penerimaan pajak parkir jalan umum dengan total penerimaan PAD). Selanjutnya, untuk menganalisis faktor pendorong, penghambat, dan perumusan strategi optimalisasi, digunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Guna menjamin keabsahan dan keandalan data kualitatif yang diperoleh, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, khususnya triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari pejabat instansi pemerintah, pengelola/juru parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara hasil wawancara, observasi langsung di titik parkir, dan bukti dokumentasi laporan keuangan daerah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan utama sesuai dengan rancangan metode penelitian, yaitu analisis kuantitatif deskriptif terhadap data sekunder keuangan daerah serta analisis kualitatif interaktif yang bersumber dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi.

Kinerja Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Jalan Umum

Berdasarkan hasil kalkulasi data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan, evaluasi kinerja keuangan dilakukan melalui perhitungan rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan sektor parkir tepi jalan umum di Wilayah Bulungan berada pada kategori sedang, dengan rata-rata persentase efektivitas berkisar antara 75% hingga 85% dalam beberapa tahun anggaran terakhir. Hal ini menandakan bahwa secara kuantitatif target penerimaan belum mampu terealisasi secara maksimal 100%.

Sementara itu, hasil perhitungan rasio kontribusi menunjukkan bahwa penerimaan pajak/retribusi parkir jalan umum masih memberikan persentase kontribusi yang tergolong kecil terhadap total struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulungan, yaitu di bawah 3%. Kecilnya rasio kontribusi ini bukan disebabkan oleh ketiadaan potensi, melainkan belum tergalinya potensi riil di lapangan secara menyeluruh akibat kendala operasional dalam tata kelola pemungutan.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pemungutan Parkir Jalan Umum

Untuk mengidentifikasi dinamika operasional di lapangan, dilakukan analisis kualitatif terhadap data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama pejabat teknis BPKAD, Dinas Perhubungan, koordinator parkir, serta juru parkir dan pengguna jasa parkir, yang diperkuat dengan triangulasi observasi langsung di titik-titik lokasi parkir utama.

Faktor pendorong utama dalam optimalisasi penerimaan ini adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Bulungan yang diiringi peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor serta tingginya tingkat mobilitas masyarakat di pusat perkotaan dan kawasan perdagangan. Selain itu, adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi pendataan potensi menjadi pijakan hukum yang kuat untuk penataan sektor ini.

Di sisi lain, analisis kualitatif mengidentifikasi beberapa faktor penghambat utama yang ditemukan di lapangan, antara lain:

1. Indikasi Kebocoran Penerimaan (*Revenue Leakage*): Berdasarkan hasil observasi lapangan dan triangulasi dengan pengguna jasa parkir, ditemukannya fakta bahwa penerbitan dan

pemberian karcis parkir resmi oleh juru parkir kepada masyarakat pengguna jasa belum dilakukan secara konsisten pada setiap transaksi.

2. Kelemahan Sistem Pengawasan: Terbatasnya personel pengawas dari dinas terkait menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas juru parkir di tepi jalan umum tidak dapat dilakukan secara berkala dan menyeluruh di seluruh titik lokasi.
3. Sistem Pendataan dan Infrastruktur: Pendataan potensi titik parkir baru belum diperbarui secara berkesinambungan seiring bertambahnya pusat aktivitas ekonomi baru, serta belum tersedianya infrastruktur pendukung untuk penerapan pembayaran secara digital (*e-parking*) yang merata di wilayah transisi.

Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Parkir Jalan Umum

Berdasarkan sintesis antara hasil perhitungan kuantitatif dan temuan kendala kualitatif di lapangan, dirumuskan strategi optimalisasi yang holistik dan berkelanjutan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan:

1. Eksplorasi dan Pemetaan Ulang Potensi: Melakukan pendataan dan pendaftaran ulang seluruh titik lokasi parkir tepi jalan umum secara digital dan geografis (*spatial mapping*) guna menetapkan target penerimaan yang presisi berdasarkan potensi riil.
2. Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan: Mengoptimalkan fungsi pengawasan lapangan melalui pembentukan tim patroli pengawas terpadu serta pemberlakuan sanksi tegas dan insentif yang jelas bagi juru parkir untuk meminimalisasi kebocoran penerimaan.
3. Digitalisasi Sistem Pemungutan Secara Bertahap: Menerapkan sistem pembayaran non-tunai (*e-parking*) atau sistem *ticketing* terintegrasi secara bertahap, dimulai dari kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi dan kesiapan jaringan yang memadai.
4. Peningkatan Edukasi dan Kepatuhan Public: Melakukan sosialisasi berkala kepada masyarakat mengenai pentingnya meminta karcis resmi saat memarkirkan kendaraan sebagai bentuk partisipasi langsung dalam pembangunan daerah melalui PAD.

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam mengenai keterkaitan antara temuan efektivitas kuantitatif dengan kendala tata kelola kualitatif di lapangan, serta penyusunan argumen mengenai strategi optimalisasi Pajak Parkir Jalan Umum di Wilayah Bulungan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa persentase efektivitas penerimaan yang berada pada kategori sedang (75%–85%) serta rasio kontribusi terhadap PAD yang masih di bawah 3% mencerminkan belum maksimalnya konversi potensi ekonomi menjadi penerimaan riil daerah. Rendahnya kontribusi ini tidak berarti bahwa sektor parkir jalan umum di Wilayah Bulungan tidak

potensial. Sebaliknya, hal ini menandakan adanya *gap* atau jarak yang cukup lebar antara potensi matematis di lapangan (jumlah kendaraan dan titik parkir) dengan realisasi kas yang masuk ke kas daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh metode penetapan target yang sering kali masih didasarkan pada historis penerimaan tahun sebelumnya, bukan berdasarkan hasil pemetaan kuantitatif potensi riil yang diperbarui secara berkala.

Temuan kualitatif mengonfirmasi bahwa kendala utama tidak tercapainya target optimal terletak pada tata kelola operasional pemungutan. Praktek tidak diberikannya karcis parkir resmi secara konsisten oleh juru parkir kepada pengguna jasa merupakan bentuk kebocoran penerimaan (*revenue leakage*) yang paling dominan. Fenomena ini muncul akibat lemahnya sistem insentif dan disinsentif bagi juru parkir, serta terbatasnya frekuensi pengawasan langsung oleh otoritas daerah. Ketika pengawasan di lapangan bersifat pasif dan sporadis, kepatuhan juru parkir untuk menyetorkan hasil pungutan secara penuh menjadi berkurang. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jasa untuk meminta karcis resmi turut memperlemah fungsi kontrol sosial dalam pemungutan pajak/retribusi parkir ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, optimalisasi Pajak Parkir Jalan Umum di Wilayah Bulungan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif semata, melainkan membutuhkan integrasi tiga pilar utama:

1. Transformasi Sistem Informasi dan Pendataan: Pemerintah daerah perlu melakukan digitalisasi data objek dan subjek parkir melalui pemetaan berbasis spasial. Pendataan ini mencakup inventarisasi titik-titik parkir baru di kawasan bisnis yang sedang berkembang untuk memastikan seluruh potensi terdaftar secara resmi.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Operasional: Diperlukan reformasi sistem pengawasan melalui pembentukan unit patroli berkala serta penerapan skema bagi hasil atau insentif yang transparan dan adil bagi para juru parkir. Langkah ini penting untuk mengubah peran juru parkir dari potensi sumber kebocoran menjadi mitra resmi pemerintah daerah yang berintegritas.
3. Penerapan Teknologi Pemungutan Adaptif (*E-Parking*): Penerapan sistem pembayaran non-tunai atau pemungutan berbasis aplikasi (*e-parking*) merupakan solusi jangka panjang yang paling efektif untuk menutup celah *revenue leakage*. Namun, penerapannya di Wilayah Bulungan harus dilakukan secara bertahap (*phasing-in*), memprioritaskan koridor-koridor utama perkotaan yang memiliki kerapatan transaksi tinggi dan aksesibilitas jaringan yang stabil, sebelum memperluasnya ke wilayah transisi.

Secara keseluruhan, optimalisasi sektor parkir tepi jalan umum di Kabupaten Bulungan memiliki prospek yang sangat besar untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Jika perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, dan digitalisasi sistem dapat dijalankan secara terintegrasi, penerimaan dari sektor ini dipastikan mampu meningkat secara signifikan tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai peran optimalisasi Pajak Parkir Jalan Umum di Wilayah Bulungan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Kinerja penerimaan Pajak Parkir Jalan Umum di Wilayah Bulungan menunjukkan tingkat efektivitas pada kategori sedang (75%–85%), dengan kontribusi yang masih relatif kecil terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu di bawah 3%. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi penerimaan sektor parkir tepi jalan umum belum tergali secara optimal ke dalam kas daerah.
2. Kendala utama yang menghambat pencapaian target penerimaan riil meliputi masih tingginya indikasi kebocoran penerimaan (*revenue leakage*) akibat tidak konsistennya pemberian karcis resmi oleh juru parkir, keterbatasan personel dan frekuensi pengawasan di lapangan, belum diperbarunya pendataan titik lokasi parkir secara berkala, serta belum terimplementasikannya sistem pemungutan berbasis teknologi secara merata.
3. Optimalisasi penerimaan pajak parkir jalan umum memerlukan pendekatan tata kelola yang terintegrasi, mencakup pembaruan basis data potensi, penguatan sistem pengawasan dan skema insentif juru parkir, serta modernisasi sistem pemungutan secara bertahap guna menutup celah kebocoran penerimaan tanpa harus menaikkan tarif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dan pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah (BPKAD dan Dinas Perhubungan):
 - a. Melakukan pendataan dan pemetaan ulang seluruh titik lokasi parkir jalan umum secara digital dan berbasis spasial untuk menetapkan target penerimaan yang presisi dan realistis.

- b. Membentuk unit atau tim patroli pengawas terpadu yang melakukan inspeksi mendadak (*sidak*) secara berkala di titik-titik parkir utama guna memastikan kepatuhan pemungutan dan penggunaan karcis resmi.
 - c. Mengembangkan dan menerapkan sistem *e-parking* atau pemungutan berbasis pembayaran non-tunai secara bertahap pada kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan transaksi yang tinggi.
2. Bagi Pengelola dan Juru Parkir:
 - a. Meningkatkan disiplin dan integritas operasional dengan selalu memberikan karcis resmi kepada setiap pengguna jasa parkir.
 - b. Mematuhi skema kemitraan dan ketentuan penetapan setoran yang telah disepakati bersama pemerintah daerah.
3. Bagi Masyarakat Pengguna Jasa Parkir:
 - a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dengan selalu meminta karcis parkir resmi saat melakukan pembayaran sebagai bentuk partisipasi langsung dalam pembangunan daerah.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya:
 - a. Memperluas cakupan penelitian dengan menganalisis secara kuantitatif tingkat kesiapan infrastruktur teknologi dan kelayakan finansial (*feasibility study*) penerapan sistem *e-parking* secara menyeluruh di Wilayah Bulungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hidayat, R., & Rahayu, S. (2024). Analisis potensi dan efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten berkembang. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 15(1), 45–58.
2. Kurniawan, A. (2022). Kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah: Studi kasus tata kelola dan potensi penerimaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Daerah*, 10(2), 112–125.
3. Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
4. Pratama, M. A., & Setiawan, B. (2021). Efektivitas pemungutan pajak parkir dan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di kawasan perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(3), 201–214.
5. Suryani, E., Hartono, D., & Nugroho, P. (2023). Tantangan dan strategi digitalisasi penerimaan daerah melalui implementasi e-parking. *Jurnal Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah*, 7(1), 33–47.
6. Wibowo, T., Handayani, L., & Santoso, H. (2025). Evaluasi kebijakan retribusi daerah pasca penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah*, 18(1), 78–92.
7. Nur, A. A., Wiryawan, D., & Amrie, M. Al. (2020). Kepuasan Konsumen Astra Motor Honda Tanjung Selor Terkait Pelayanan Showroom. 2(2), 109–117.
8. Al Amrie, M., Nur, A. A., & Wiryawan, D. (2022). Manajemen Dan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga: Desa Sajau Tanjung Selor. *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1), 9-14.
9. Nur, A. A., & Wiryawan, D. (2022). Program Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Bagi Umkm. *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1), 1-4.
10. Mader, Peri, and Adi Aspian Nur. "PENGARUH RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2007-2013." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah* 1.1 (2020): 1-8.
11. Nur, Adi Aspian. "ANALISIS PEMEKARAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA JELARAI KABUPATEN BULUNGAN." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah* 1.2 (2021): 18-35.
12. Rahmayani, Roslina Fitri, and Adi Aspian Nur. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAMA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah* 2.1 (2021): 115-125.
13. Wiryawan, Dedik, and Adi Aspian Nur. "Pengaruh Ekuitas Merek (Brand Equity) Pada Keputusan Pembelian Produk Smartphone Vivo di Tanjung Selor." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5.02 (2021): 345-356.
14. Nur, Adi Aspian. "Analisis masalah produksi usaha tambak udang di Kabupaten Berau." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya* 11.1 (2023): 34-41.

15. Nur, Adi Aspian, Suud Ema Fauziah, and Dedik Wiryawan. "Program Pelatihan Wirausaha Dalam 6-Pemanfaatan Sampah Kertas Koran Bekas Menjadi Kerajinan Fungsional Sebagai Upaya." *PLAKAT: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat* 3.1 (2021): 1-10.
16. Octaviana, Sri, Hendra Laksamana, and Adi Aspian Nur. "Meningkatkan Pelayanan JNE di Batas Negeri." *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT* 1.2 (2022): 1-7.
17. Wahyuni, Rina Sri, and Adi Aspian Nur. "Memilih Strategi Bisnis Yang Tepat Bagi Generasi Muda Pada Siswa dan Siswi SMKN 1." *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT* 1.1 (2022): 5-8.
18. Nur, A. A. (2023). Pemanfaatan Limbah Jagung Untuk Keberlanjutan Lingkungan Dan Ekonomi: Kecamatan Tanjung Palas (Lebong). *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(2), 1-6.